BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Data Yang Akurat

Secara harfiah, istilah data yang akurat adalah menunjukkan data yang benar dan tepat sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Namun demikian, data yang memenuhi kriteria tersebut sangat sulit diperoleh, karena adanya berbagai kendala dalam penyusunan data tersebut. Oleh karena itu, seringkali data yang diartikan akurat merupakan data yang dapat mewakili atau mendekati keadaan sebenarnya. Secara ideal suatu data hendaknya diuji atau dikaji kembali dengan menggunakan ukuran-ukuran kuantitatif, sehingga mempermudah penilaian tingkat akurasi data.

Berkaitan dengan akurasi data keuangan negara, perlu dilihat kembali apa yang sebenarnya terkandung dalam data tersebut. Data tentang keuangan negara yang selama ini digunakan untuk berbagai keperluan, diolah oleh PPDIA berasal dari KTUA yang mendapatkan data dari KPKN yaitu berupa disket dan dokumen berupa Lembar ke-4 (Empat) SPM Rekening Khusus beserta dokumen pendukung lainnya dimana masing-masing data memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sebagai laporan kegiatan pembangunan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Untuk menghasilkan informasi yang baik dan sesuai dengan yang diperlukan oleh bagian-bagian yang memerlukannya, maka akurasi data sangat diperlukan. Usaha yang dilakukan oleh PPDIA untuk mendapatkan data yang akurat kemudian diolah, maka sesuai dengan tugas yang dilaksanakannya, data

yang berasal dari KTUA diolah sebaik mungkin dan apabila data yang sedang diolah dirasakan tidak akurat baik dalam kebenaran, kelengkapan, dan ketepatannya maka PPDIA akan mengirimkan surat kepada KPKN yang bersangkutan untuk meminta pertanggungjawaban atas ketidak akurasian data pembangunan proyek. Setelah diadakan beberapa kali konfirmasi dengan KPKN dan data yang diperlukan dirasakan sudah akurat maka data tersebut diolah menjadi informasi yang berguna bagi bagian-bagian yang memerlukannya guna menentukan suatu keputusan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan selanjutnya.

4.2. Masalah Dalam Pelaksanaan Sistem Pengolahan Data

Kondisi yang ada sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab III dimuka menunjukkan bahwa sistem pengolahan data yang dilakukan masih mengalami berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, berkaitan dengan data masukan yang diterima, permasalahan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Rusaknya dokumen yang diterima oleh PPDIA

   Kerusakan tersebut menyebabkan data yang terdapat dalam disket tersebut tidak dapat dibaca oleh komputer serta tidak dapat dilakukan kegiatan transfer data. Sehingga data yang ada tidak dapat diolah lebih lanjut. Sebagai contoh, berdasarkan pengamatan dilapangan diperoleh data bahwa untuk dokumen yang diterima selama bulan Nopember 1995, terdapat 15 dokumen yang tidak dapat diolah. Rusaknya dokumen tersebut dapat terjadi antara lain karena :

- Masalah didalam pengiriman, seperti kesalahan dari jasa pengiriman yang tidak menyimpan disket dalam boks yang terlindung.
- Kesalahan dari petugas pengiriman pada KPKN yang tidak memberikan tanda bahwa yang dikirimnya merupakan disket yang mudah rusak.
- Disket yang dikirim adalah disket yang telah berulang kali dipakai.

2. Perbedaan program yang digunakan antara KPKN sebagai pengirim data dengan program mesin komputer yang digunakan pada PPDIA

   Perbedaan program tersebut menyebabkan komputer yang digunakan pada PPDIA tidak dapat membaca data yang ada pada disket. Dengan sendirinya transfer data ke dalam mainframe tidak dapat dilakukan. Hal ini terjadi antara lain disebabkan kurangnya komunikasi antara PPDIA dengan para programmer di daerah. Sehingga program-program yang digunakan menjadi berbeda. Sementara program baku yang disusun oleh PPDIA belum disebar luaskan secara merata keseluruh KPKN di Indonesia.

3. Masalah kebenaran data dokumen yang dikirim

   Lembar ke-4 SPM sebagai dokumen yang diterima oleh PPDIA setiap minggunya dari 128 KPKN, merupakan bahan pengolahan data dengan cara melampirkannya pada list editing. Sehingga apabila list editing tersebut dalam kategori "kotor", maka dapat dilakukan perbaikan dengan berpedoman pada dokumen SPM.

   Pada kenyataannya, data dokumen masih seringkali tidak dapat dijadikan pedoman verifikasi. Data antara dokumen dengan list editing seringkali sudah sama, namun masih tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam program komputer. Misalnya, data tersebut tidak sesuai dengan Daftar Isian Kegiatan

(DIK), sehingga akan keluar error. Selanjutnya masalah ini akan memperlambat proses pengolahan data untuk dijadikan bahan informasi laporan PPDIA.

Untuk menangani masalah tersebut, maka PPDIA perlu lebih giat melakukan komunikasi dengan KPKN yang mengirimkan data masukan. Sehingga apabila terdapat permasalahan pada data masukan dapat secepatnya diperbaiki. Seperti masalah pada rusaknya data yang dikirimkan, maka perlu untuk secepatnya dikirimkan surat kepada KPKN tersebut untuk mengirimkan kembali copy datanya. Sehingga data tersebut dapat secepatnya diolah. Sementara masalah pada kebenaran isi dokumen, perlu ditangani dengan mengirimkan surat teguran kepada KPKN apabila kesalahan tersebut berulangkali dilakukan. Hal ini penting untuk dilakukan agar kebenaran data yang diolah dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk komunikasi tersebut dapat berupa surat edaran kepada KPKN dan Kantor Tata Usaha (KTUA) yang memperingatkan mengenai kesalahan dalam jumlah pengiriman dan penulisan kode kegiatan maupun kode satuan kerja (satker), serta kode lainnya pada SPMdan data pada disket.

Sebagai bahan pertimbangan hal tersebut dapat dijadikan bahan pengawasan melekat pada pelaksanaan tugas pokok KPKN dan KTUA. Tingkat frekuensi dan banyaknya kesalahan yang ditemukan tersebut dapat dijadikan salah satu bahan penilaian kelancaran pelaksanaan tugas pada kantor yang bersangkutan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama dan komunikasi dengan Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara yang membawahi langsung seluruh KPKN dan KTUA yang ada di Indonesia.

Sementara masalah perbedaan program, maka perlu diadakannya pertemuan ataupun peninjauan antara programmer PPDIA dengan programmer KPKN sehingga penyebarluasan program baku dapat dilakukan dan dilaksanakan pada KPKN. Komunikasi antar programmer di daerah dengan PPDIA perlu untuk selalu dilakukan, mengingat sistem informasi selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang digunakan. Untuk itu penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan berkaitan dengan program, perlu untuk selalu diinformasikan kepada KPKN. Sehingga terdapat kesesuaian antara program komputer dari KPKN dan PPDIA. Dengan adanya hal tersebut maka akan lebih mempermudah kegiatan transfer data pada sistem pengolahan data.

4.3. Masalah Sistem Pengolahan Data Pada Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi

Bidang persiapan data dan pelayanan informasi (PDPI) sebagai pengolah data masukan untuk menghasilkan data keluaran, masih mengalami berbagai masalah didalam melaksanakan sistem pengolahan data. Penyebab timbulnya masalah dalam bidang persiapan data dan pelayanan informasi sebagai unit pengolah dokumen antara lain adalah :

1. Kurangnya antisipasi terhadap sistem pengolahan data

   Penyempurnaan sistem pengolahan data yang dilakukan sekarang ini menimbulkan perubahan dari sistem batching menjadi sistem dengan melampirkan dokumen pada list editing. Perubahan ini dengan sendirinya menimbulkan pengaruh pada kegiatan lainnya. Pada kenyataannya, perubahan tersebut kurang diantisipasi pada bidang PDPI. Apabila dengan sistem lama, sortir yang dilakukan pada bidang ini merupakan awal dari proses pengolahan

data, namun dengan sistem sekarang ini perekaman disket pada bidang Operasional Komputer adalah awal kegiatannya. Untuk itu bidang PDPI lebih bersifat menunggu datangnya dokumen beserta list editing. Untuk kemudian melampirkannya, serta melakukan verifikasi data.

Kegiatan ini harus diantisipasi dengan baik, karena seringkali data yang diolah tiba pada saat yang bersamaan dalam jumlah yang relatif banyak. Sementara pengawasan terhadap jumlah SPM harus tetap dilakukan. Dan masih harus ditambah dengan kegiatan pembundelan dokumen. Kurangnya antisipasi ini tampak pula pada semakin banyaknya dokumen yang tercecer serta kesulitan mencari data sewaktu-waktu diperlukan. Hal ini karena data yang telah diolah tidak disimpan pada bundel yang seharusnya.

2. Kesulitan didalam verifikasi data kotor

Masalah selanjutnya pada pelaksanaan penyempurnaan sistem adalah kesulitan melakukan verifikasi data kotor yang harus diperbaiki pada bidang PDPI. Adanya kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam isi dokumen serta list editing merupakan penyebab terjadinya data kotor. Untuk itu, mutlak dilakukan perbaikan data, agar data tersebut dapat diterima oleh komputer. Perbaikan yang dilakukan memerlukan suatu pedoman, sebagaimana yang telah dijelaskan pada permasalahan kebenaran data. Sementara itu daftar tabel sebagai dokumen pendamping masih belum ada. Penanganan masalah perbaikan data kotor masih dilakukan kasus per kasus sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama sementara masalah yang harus diselesaikan cukuplah banyak, dan daftar tabel lama yang ada tidak sesuai lagi dengan program yang disesuaikan dengan sistem yang disempurnakan.

3. Tidak adanya batas waktu penyelesaian pekerjaan pengolahan data.

Mengingat bahwa penanganan masalah masih ditangani per kasus, menjadikan tidak adanya batas waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian rekap header sebagai rekapitulasi keseluruhan data yang telah diterima dan diolah PPDIA untuk bahan penyusunan laporan tidak dapat dibuat setiap bulan. Hal ini turut mempengaruhi tahap selanjutnya pada sistem pengolahan data.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka dapat kita pahami bahwa penanganan masalah pelaksanaan kegiatan pengolahan data pada bidang PDPI perlu untuk segera ditangani, mengingat bidang ini mengolah data masukan untuk menghasilkan data keluaran sebagai bahan informasi laporan realisasi anggaran pembangunan negara. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah secepatnya dilakukan antisipasi penyempurnaan sistem pengolahan data, agar perubahan-perubahan kegiatan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengolahan data dapat disesuaikan dengan sistem yang telah disempurnakan.

Langkah selanjutnya dari antisipasi penyempurnaan sistem pengolahan data adalah perlu adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan bidang PDPI, sehingga apabila masih dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat secepatnya dicarikan jalan keluarnya. Dengan adanya antisipasi-antisipasi yang dilakukan tersebut maka kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan tujuan yang diharapkan dari adanya perbaikan sistem pengolahan data.

4.4. Hubungan Antar Bidang yang Terkait Dalam Pelaksanaan Pengolahan Data

SIM sebagai suatu sistem terpadu, membutuhkan adanya hubungan yang erat antar subsistem yang ada didalamnya, sehingga kegiatan pengolahan data yang dilakukan sebagai bagian dari sistem tersebut akan mempengaruhi jalannya sistem itu sendiri. Pada PPDIA pelaksanaan perbaikan sistem pengolahan data masih mengalami hambatan dalam hubungan bidang yang terkait. Masalah yang tampak terutama adalah pada kesulitan perbaikan data, yang terutama disebabkan belum adanya daftar tabel sesuai program yang ada. Sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, maka penanganan masalah penyusunan daftar tabel yang berkaitan dengan program adalah merupakan tugas dari bidang Pengembangan Sistem Aplikasi dan Program. Daftar tersebut disusun oleh programmer, dengan memperhatikan masukan dari bidang PDPI.

Untuk itu perlu diupayakan adanya hubungan erat antar bidang yang terkait, agar pelaksanaan kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan baik, hal ini penting, mengingat bahwa masing-masing bidang pada PPDIA dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, sesungguhnya memeliki tujuan yang satu yaitu menyajikan laporan yang bersumber dari data masukan yang diterima oleh PPDIA, yang berguna dalam pengambilan keputusan mengenai anggaran negara.

Adanya koordinasi antar bidang didalam menangani permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kegiatan pengolahan data akan memudahkan kelancaran tugas PPDIA. Untuk itu, masing-masing bidang perlu selalu mengadakan hubungan dan koordinasi., yang antara lain dengan melakukan penanganan bersama dan membahas masalah dalam kegiatan pengolahan data. Dengan

adanya komunikasi yang lancar melalui koordinasi dan dengan adanya kesadaran bersama bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang sesungguhnya akan mencapai tujuan yang sama, maka perbaikan akan sistem pengolahan data dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengolahan data dapat di atasi bersama.